

Jember. Usaha pengembangan koperasi yang dilakukan dengan adanya pembukaan cabang baru tersebut masih tetap berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri menjadi sebuah lembaga yang memiliki asset yang besar.

Dalam setiap tahun Koperasi UGT Sidogiri diharapkan bisa membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota kota yang dinilai memiliki potensi untuk pengembangan BMT Sidogiri. Saat ini Koperasi UGT Sidogiri telah berusia 14 tahun dan telah memiliki 230 unit layanan BMT (*Baitul Mak wat Tamwik* atau Koperasi Jasa Keuangan syariah), dan 1 unit pelayanan transfer.

Simpanan pokok yang ditetapkan bagi anggota koperasi sebesar Rp1.000.000,00 koperasi ini juga akan membuka CPK (Cabang Pelayanan Koperasi) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi. Dalam pengembangannya, Koperasi BMT MMU ini bermitra dengan koperasi UGT. Hal tersebut dikarenakan kedua lembaga memiliki kesamaan dalam mengelolah usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT.

Koperasi UGT didirikan oleh beberapa guru dan pimpinan Madrasah Miftahul Ulum (MMU) pondok pesantren Sidogiri, alumni pondok pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas (UGT) pondok pesantren Sidogiri. Dalam jangka panjang koperasi UGT diharapkan bisa dibuka beberapa unit pelayanan

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Kafakah* Haji

Produk ini adalah pembiayaan *kafakah* haji yang mana dalam praktiknya menggunakan akad *kafakah bi al-ujrah*. Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pembiayaan *kafakah* haji adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafakah* dengan ketentuan umum antara lain:
 - 1) Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - 2) Dalam akad *kafakah*, penjamin dalam menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
 - 3) *Kafakah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dengan ketentuan pembiayaan sebagai berikut:
 - 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

- 3) Sistem angsuran:
 - a) Secara tetap (pokok + *ujrah kafakah*) setiap bulan.
 - b) Angsuran pokok *kafakah* secara musiman (panenan) dan *ujrah kafakah* dibayar di awal.
- b. Persyaratan permohonan pembiayaan *kafakah* haji
 - 1) Warga negara Indonesia.
 - 2) Telah memiliki tabungan haji *al-haramain*.
 - 3) Melampirkan identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, suami/istri), calon haji yang ditanggung).
 - 4) Melampirkan *copy* surat nikah dan kartu keluarga (KK).
 - 5) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di bank syariah (bank Panin Syariah) atas nama calon jama'ah haji.

Dana talangan yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp22.500.000,00 dan jangka waktu pelunasan maksimal 5 tahun. Apabila dalam jangka waktu angsuran yang telah disepakati di awal akad nasabah belum mampu melunasinya, maka akan diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu angsuran. Apabila nasabah masih belum dapat melunasi angsuran hingga pada batas waktu maksimal, maka pihak BMT akan melakukan pembatalan nomor *seat* porsi haji tersebut. Di sisi lain, jika nasabah mampu melunasi angsuran pembiayaan *kafakah* haji sebelum batas waktu yang telah disepakati,

telah ditunjuk oleh Kemenag RI untuk bisa mendaftarkan haji bagi nasabah yang membutuhkan fasilitas ini.

Setelah permohonan pembiayaan disetujui, BMT dan nasabah melakukan penandatanganan akad perjanjian pembiayaan *kafakah* haji dengan prinsip *kafakah bi al-ujrah*. Selanjutnya BMT memberikan dana tanggungan dengan membuka rekening tabungan haji dan umrah iB di Bank Panin Syariah selaku lembaga resmi sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang telah ditunjuk oleh Kemenag RI.

Setelah itu, pihak BMT, Bank Panin Syariah serta nasabah calon jama'ah haji berangkat ke Departemen Agama (waktu pertemuan ditentukan berdasarkan kesepakatan) dengan membawa cetak rekening tabungan haji iB untuk mendapat Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan membayar setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Departemen Agama. Kemudian Bank Panin Syariah membawa tanda bukti SPPH guna mengakses nomor *seat* porsi haji di SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) atas nama nasabah calon jama'ah haji. Dari pembiayaan haji tersebut, nasabah harus membayar biaya administrasi perbulannya atas pembiayaan *kafakah* haji sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal akad.

Pihak BMT berhak melakukan pembatalan kepada Departemen Agama dan menarik dana yang sudah masuk. Oleh karena itu di awal perjanjian, selain mengisi *form* permohonan pembiayaan *kafakah* haji, nasabah juga mengisi *form*/surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debet rekening tabungan haji dan umrah iB. Proses tersebut dilakukan pihak BMT apabila dikemudian hari terjadi pembatalan baik itu dari pihak BMT atau pun atas keinginan nasabah sendiri untuk mengundurkan diri. Apabila nasabah dapat melunasi angsuran sebelum jatuh tempo, maka biaya administrasi dihitung secara proporsional artinya biaya administrasi dihitung pada bulan berjalan.

